

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ viii

BAB 1 : PENDAHULUAN

- A. Pengantar ~ 1
- B. Peristilahan dan Pengertian Hukum Administrasi ~ 8
 - B.1. Peristilahan Hukum Administrasi ~ 8
 - B.2. Pengertian Hukum Administrasi ~ 10
- C. Ruang Lingkup dan Pembagian Hukum Administrasi ~ 16
- D. Obyek Hukum Administrasi ~ 20

BAB 2 : DIMENSI NORMATIF HUKUM ADMINISTRASI

- A. Pemerintah atau Administrasim ~ 27
- B. Konstruksi Yuridis Jabatan Pemerintahan ~ 31
- C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan ~ 37
- D. Penormaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan ~ 41
 - D.1. Wet-en Rechtmatigheid van Bestuur ~ 41

- D.2. Onwet-en Onrechtmatigheid van Bestuur ~ 46
- E. Pertanggungjawaban Pemerintahan ~ 51
- F. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ~ 55
 - F.1. Makna dan Fungsi AAUPB ~ 55
 - F.2. Macam-macam AAUPB ~ 57
 - F.3. AAUPB dalam Pembuatan Keputusan ~ 59

BAB 3 : DIMENSI INSTRUMENTALIA HUKUM ADMINISTRASI

- A. Kewenangan Legislasi bagi Pemerintah ~ 62
- B. Instrumen Hukum Pemerintahan ~ 65
 - B.1. Peraturan Perundang-undangan ~ 65
 - B.2. Keputusan Tata Usaha Negara ~ 71
 - B.2.1. Pengertian Keputusan ~ 71
 - B.2.2. Persyaratan dan Kekuatan Hukum Keputusan ~ 73
 - B.2.3. Format dan Isi Keputusan ~ 75
 - B.3. Peraturan Kebijakan. ~ 80
 - B.3.1. freies Ermessen dan Peraturan Kebijakan ~ 80
 - B.3.2. Pengertian, Unsur-unsur, dan Ciri-ciri Peraturan Kebijakan ~ 82
 - B.3.3. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan ~ 87
 - B.4. Perusahaan Negara (BUMN/BUMD) ~ 89
 - B.4.1. Dimensi Historis dan Teoretis BUMN/BUMD ~ 89
 - B.4.2. Dasar Filosofis dan Yuridis BUMN/BUMD di Indonesia ~ 91
 - B.4.3. Kedudukan Hukum BUMN/BUMD di Indonesia ~ 93
 - B.4.4. Konsekuensi Hukum Perbedaan Perum dan Persero ~ 98

B.4.5. Penyalahgunaan Kewenangan dan Keuangan BUMN/
BUMD ~ 103

C. Penegakan Hukum oleh Pemerintah ~ 104

C.1. Pengawasan oleh Administrasi ~ 106

C.2. Sanksi Administrasi ~ 109

BAB 4 : DIMENSI PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI

A. Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi ~ 118

A.1. Pengertian Perlindungan Hukum ~ 118

A.2. Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi ~ 120

A.3. Arti Penting Perlindungan Hukum Administrasi ~ 123

B. Perlindungan Hukum Preventif ~ 124

B.1. Pengawasan terhadap Administrasi ~ 126

B.2. Pengesahan atau Persetujuan ~ 128

B.3. Keterbukaan Pemerintahan ~ 131

B.4. Peran Serta Warga Negara ~ 139

C. Perlindungan Hukum Represif ~ 141

BAB 5 : PERADILAN ADMINISTRASI

A. Karakteristik Peradilan Administrasi ~ 146

B. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Administrasi ~ 155

C. Penyelesaian Sengketa Administrasi ~ 162

C.1. Obyek Sengketa ~ 162

C.2. Jalur Penyelesaian Sengketa ~ 166

C.2.1. Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Administratif ~
167

C.2.2. Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Administrasi
~ 168

C.3. Gugatan ke Peradilan Administrasi ~ 170

- C.3.1. Alasan Mengajukan Gugatan ~ 172
- C.3.2. Syarat-syarat Gugatan ~ 176
- C.3.3. Prosedur Pengajuan Gugatan ~ 177
- C.3.4. Tuntutan dalam Gugatan ~ 178
- D. Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara di Peradilan Administras
~ 180
 - D.1. Dismissal Proses ~ 180
 - D.2. Pemeriksaan Persiapan ~ 181
 - D.3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat ~ 182
 - D.4. Pemeriksaan dengan Acara Biasa ~ 183
 - D.5. Pemeriksaan dengan Acara Cepat ~ 185
- E. Pembuktian ~ 187
 - E.1. Pengertian Pembuktian ~ 187
 - E.2. Alat-alat Bukti ~ 188
 - E.3. Beban Pembuktian ~ 189
- F. Putusan dan Pelaksanaan Putusan ~ 191
 - F.1. Pengertian Putusan ~ 191
 - F.2. Pelaksanaan Putusan ~ 194
 - F.3. Kendala-kendala Pelaksanaan Putusan PTUN ~ 197

DAFTAR PUSTAKA ~ 210